ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ACEH BARAT.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas

Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

HERU ADE ALVIAN
1405906010091

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
KAMPUS UTU, Meulaboh-Aceh Barat PO BOX 59 Telp (0655) 7110535
Laman: www.utu.ac.id Emaail: fekon_utu@yahoo.ac.id

Meulaboh, 19 April 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Heru Ade Alvian

NIM : 1405906010091

Dengan judul: **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Alisman, S.E., M.Si	**Yenny Ertika, S.E., M. Si**
NIDN. 0113026404	**NIDN. 0130058101**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si	**Dr. Helmi Noviar, SE., M Si**
NIP. 196002122198903 1003	**NIP. 197411052018011901**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
KAMPUS UTU, Meulaboh-Aceh Barat PO BOX 59 Telp (0655) 7110535
Laman: www.utu.ac.id Emaail: fekon_utu@yahoo.ac.id

Meulaboh, 19 April 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Heru Ade Alvian

NIM : 1405906010091

Dengan judul: **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat.**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada Tanggal 30 September 2021

Menyetujui

				Tanda Tangan
1.	Ketua	:	Alisman, S.E., M. Si	……..
2.	Sekretaris	:	Yenny Ertika, S.E., M. Si	……..
3.	Anggota	:	Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si	……..
4.	Anggota	:	Rollis Yuliansyah, S.E., M.Si	……..

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. Helmi Noviar, S.E., M. Si
NIP. 197411052021121 1002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Ade Alvian

NIM : 1405906010091

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai buku, atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 01 Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan

Heru Ade Alvian
1405906010091

KATA PERSEMBAHAN

"Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui" (Q.S. Al-'Alaq 1-5)

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.S. Ar- Rahman)

Ya Allah

Waktu yang terus berjalan, dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, rasa sedih, bahagia, suka, dan duka, ku bersujud dihadapan mu, Engkau memberiku ilmu agar aku bisa memulai perjuanganku,

Segala puji bagi Mu ya Allah.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah diri ini tiada daya tanpa kekuatan-mu

Shalawat dan salamku kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW

Ku berharap syafaatmu di penghujung hari nanti.

Dengan ridha-Mu ya Allah

Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,

Namun ini bukan akhir dari perjalananku,

Melainkan awal dari sebuah perjalanan,

Ku persembahakan karya kecil ini.

Ayahku Idris dan Ibuku Adridawati

Terima kasih bukti keseriusanku, tak dapat membalas semua jasa dan pengorbanan yang tiada henti.

Setiap hari memberikan semangat dan motivasi, menjadi sandaran ketika aku tak sanggup berdiri,

memapahku dengan cinta dan kasih,

Mendengar keluh kesahku, memberiku solusi terbaik,

Menemaniku siang dan malam menyelesaikan tugas studiku,

Terimakasih Ibu telah melahirkan aku, bagaikan malaikat tak bersayap yang diciptakan Allah untukku,

Terimakasih Ayah selalu sedia menjadi "Hero" terkuat dan terhebat di dunia.

Terimakasih telah menjadi orang tuaku

Ayah dan IBu, semoga Allah memberikan kesehatan untuk dapat melihatku memakai toga kebanggaanku.

Dan semoga aku diberikan waktu oleh Allah agar dapat membanggakan, ayah da Ibu. Amin.

Ya Allah jadikanlah aku anak yang sholeh, berbakti keapda orang tua, dan menjadi amal yang tak putus bagi keduanya. Amin.

Untuk abangku dan kakakku tersayang "sukma Wijaya dan Risda Dian Febrian"

Terima kasih kepada abang dan kakak atas doa dan bantuan abang dan kakak dalam memberi semangat bagi adikmu, semoga langkah awal adikmu ini bisa jadi sebuah kebanggaan. Dan semoga abang dan kakak menjadi anak yang sholeh dan sholeha serta orang yang sukses dunia maupun akhirat.

Untuk adikku tersayang "Indah Putri Arisda"

Terima kasih kepada adik atas doa dan bantuan adik dalam memberi semangat bagi abang, semoga langkah awal abang ini bisa jadi contoh buat adik. Dan semoga adek menjadi anak yang sholeha serta jadi anak yang sukses dunia maupun akhirat.

Kepada pembimbing I Bapak Alisman, SE., M.Si dan kepada pembimbing II Ibu Yenny Ertika, S.E. M. Si

Terimakasih telah menjadi orang tua kedua bagi saya di kampus. Terima kasih selama ini telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkanku serta memberiku pelajaran yang tak ternilai harganya terima kasih atas jasa-jasa kalian yang selalu ku ingat sampai nanti.

Terima kasih untuk sahabatku "Alvian Djunaidi"

Terima kasih untuk nasihat dan segala kasih sayang yang diberikan kepadaku, serta motivasinya sehingga aku bisa selsai dalam menulis karya ini.

Terima kasih aku sampaikan kepada

Seluruh teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

Tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa.

Dengan ridha Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang mencintaiku,

Terima kasih beribu-ribu kasih kuucapkan serta beribu maaf atas semua kesalahanku.

Heru Ade Alvian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT atas kuasanya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul ***"Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Aceh Barat"*** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk ayahanda Idris dan ibunda Adridawati serta kakanda Sukma Wijaya dan Risda Dian Febrian dan adindaku Indah Putri Arisda, dan para sahabat yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang yang tiada batas dan do'a tulusnya demi kebaikan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Jasman S. Ma'ruf, SE.MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh.

3. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh.
4. Bapak Dr. Helmi Noviar, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Dr. Saiful Badli, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
6. Bapak Alisman,SE., M.Si dan Yenny Ertika,S.E.M.Si selaku Dosen Pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua kedua yang membimbing, memberikan arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Orang tua dan keluarga saya tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan baik itu berupa material dan moral yang mungkin sangat berguna bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Meulaboh, 07 Agustus 2021

Penulis,

(Heru Ade Alvian)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan anggaran Negara yang efektif dan efisien. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data selama 16 tahun terakhir. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui BPS (Badan pusat statistik) dan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Selanjutnya data dianalisis dengan metode yang meliputi uji asumsi klasik, uji t, uji F, analisis korelasi (r) dan analisis koefisien determinasi (R^2). Untuk menganalisis data diguakan *software* SPSS. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian apabila dilihat secara simultan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and analyze Government Expenditure and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Regional Original Income (ROI) of West Aceh Regency. The research was conducted by analyzing data for the last 16 years. The data in this study were collected through BPS (Central Statistics Agency) and BPKD (Regional Financial Management Agency). Furthermore, the data were analyzed using methods including classical assumption testt, test F, test independent analysis (r) and determination coefficient analysis (R2). SPSS software was used to analyze the data. Analysis of the data in the study using multiple linear regression equations, the results of this study show that partially Government Expenditure has a positive and significant effect on Regional Original Income (ROI). Meanwhile, the Gross Regional Domestic Product (GRDP) does not have a positive and significant effect on Regional Original Income (ROI). However, it is seen simultaneously that Government Expenditure and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have a positive and significant effect on Regional Original Income (ROI).

Keywords : *Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product and Original Local Gevernmen Revenue*

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Heru Ade Alvian
NIM	:	1405906010091
Tempaat/Tanggal Lahir	:	Banda Aceh, 13 Juli 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Status Perkawainan	:	Belum Menikah
Kewarnegaraan	:	WNI
Alamat	:	jln. Abdullah PK, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan
E-Mail	:	heruadealvian7@gmail.com
Telepon	:	085260699293

Pendidikan Formal :

1.	Min Drien Rampak	2003-2008
2.	SMPN 3 Meulaboh	2008-2011
3.	SMAN 2 Meulaboh	2011-2014
4.	Universitas Teuku Umar	2014-2021

Data Orangtua

Nama Ayah	:	Idris
Nama Ibu	:	Adridawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN..... **ii**
PERNYATAAN PLAGIAT..... **iii**
KATA PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR..... **vi**
ABSTRAC..... ***viii***
ABSTRAK ..... **ix**
BIODATA ..... **x**
DAFTAR ISI..... **xi**
DAFTAR TABEL..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR..... **xiv**
DAFTAR GRAFIK ..... **xv**

LAMPIRAN..... **xvi**
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.4.1 Manfaat Teoritis 7
1.4.2 Manfaat praktis..... 8
1.5 SistematikaPembahasan 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD**)** 10
2.2 Pengeluaran Pemerintah..... 14
2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 17
2.4 Penelitian Terdahulu 23
2.5 Kerangka Pemikiran..... 29
2.6 Perumusan Hipotesis..... 29

BAB III. METODE PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Penelitian..... 31
3.2 Data Penelitian 31
3.2.1 Jenis dan Sumber data..... 31
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data..... 31
3.3 Model Analisis Data..... 32
3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 32
3.3.2 Analisis Koefesien Korelasi dan Determinasi..... 33
3.3.3 Uji t..... 33
3.3.4 Uji F 33
3.4 Uji Asumsi Klasik 34
3.4.1 Uji Normalitas..... 34

3.4.2 Uji Multikolinieritas 35
3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 35
3.4.4 Uji Autokolerasi 35
3.5 Definisi Operasional Variabel 36
3.6 Pengujian Hipotesis 37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
4.2 Hasil Penelitian 41
4.2.1 Pengeluaran Pemerintah 41
4.2.2 PDRB 42
4.2.3 PAD 43
4.3 Hasil Analisis Data 44
4.3.1 Uji Regresi Linear Berganda 44
4.3.2 Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi 45
4.3.3 Uji t 46
4.3.4 Uji F 46
4.4 Uji Asumsi Klasik 47
4.4.1 Uji Normalitas 47
4.4.2 Uji Multikolinearitas 48
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 48
4.4.4 Uji Autokorelasi 51

BAB V. KESIMPULANDANSARAN
5.1 Kesimpulan 52
5.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL

1.1 Uraian Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD Propinsi Aceh Tahun 2013-2017 4

1.2 Uraian Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2017 6

2.1 Penelitian Terdahulu 23

4.1 Perkembangan JumlahPengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat 43

4.2 Perkembangan Jumlah PDRB di Kabupaten Aceh Barat 44

4.3 Perkembangan Jumlah PAD di Kabupaten Aceh Barat 45

4.4 Uji Regresi Linear Berganda 46

4.5 Analisis Korelasi dan KoefisinDeterminasi 47

4.6 Uji F 48

4.7 Uji Multikolinearitas 50

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka pemikiran pengaruh pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah 29

4.1 Peta Kabupaten Aceh Barat 41

DAFTAR GRAFIK

4.1 Grafik Normal P-Plot 50

4.2 Uji Heteroskedastisitas 51

DAFTAR LAMPIRAN

1 Surat Izin Penelitian..... 59

2 Surat Balasan Penelitian 60

3 Data Input 61

4 Data Output..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pemerintahan negara-negara di seluruh dunia dalam menjalani sistem kepemimpinanya baik itu negara dengan sistem monarki, demokrasi, federasi maupun sistem lainnya, terus berlomba melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan selaku penguasa dari suatu negara diharapkan dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya dan kedaulatan bagi negara yang dipimpinnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah menjalankan program-program strategis demi memenuhi kebutuhan rakyatnya dan seluruh biaya operasional negara dalam masa kepemimpinannya.

Hanafi dan Zulham (2019, h. 398) menyebutkan pengeluaran pemerintah berbentuk belanja pemerintah merupakan pemikiran antara gabungan produk yang diproduksi untuk pemenuhan barang publik dengan pelayanan untuk masyarakat yang berisi jawaban atas putusan yang dibuat pemerintah. Guna memisahkan anggaran belanja terhadap capaian prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka pembagian belanja daerah dibedakan ke dalam belanja langsung (belanja publik) dan belanja tidak langsung (belanja aparatur).

Menurut Sukirno (2019, h. 38) pengeluaran pemerintah adalah untuk membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat, kemudian pengeluaran juga untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pembayaran gaji untuk pegawai pemerintah dan

pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam pembelian keatas barang dan jasa tersebut dapat digolongkan kepada dua golongan yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah.

Negara kita Indonesia seringkali dihadapi dengan defisit anggaran,sehingga ini dapat melemahkan kondisi perekonomian dan menghambat pembangunan yang sudah direncanakan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk perekonomian suatu negara dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, dimana banyak kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat umum yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, sekalipun negara sudah melakukan pengeluaran yang maksimal.

Hal tersebut diakibatkan oleh terlalu banyaknya pengeluaran pemerintah yang bersifat konsumtif, kemudian penggunaan anggaran negara yang tidak memperhatikan azas efektif dan efisien, penggunaan anggaran lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak tepat sasaran dan lebih jauh lagi masih banyaknya penggunaan anggaran yang disalah gunakan atau tidakdapat dipertanggung jawabkan oleh oknum pejabat di negeri ini.

Untuk menghindari kondisi sulit tersebut, sudah seharusnya pemerintah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah propinsi dan kabupaten/kota lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan operasional pemerintahannya dan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian pemerintah juga dituntut untuk memiliki sifat kreatif dan inovatif dalam penggunaan anggaran daerah agar pengeluaran pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bisa bersifat

produktif dengan cara pemerintah harus giat melakukan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatanpemerintah baik ditingkat nasional maupun daerah propinsi dan kabupaten/kota. Pengeluaran pemerintah erat sekali kaitannya dengan kondisi perekonomian dimasa yang akan datang. Apabila pemerintah menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien, pastinya akan berimplikasi kepada menggeliatnya denyut nadi perekonomian yang dapat dilihat dari kondisi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) yang akan terus bertumbuh dengan tren yang positif.

Pada era reformasi seperti saat ini kondisisosial politik yang stabil, jauh dari kekacauan konflik dan semakin jarangnya terjadi krisis, ini merupakan hal yang sangatbaik. Dengan terciptanya kondisi aman dan kondusif menyebabkan masyarakat semakin semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang produktif. Masyarakat bebas memilih dan mengembangkan usaha sektor-sektor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihatdari menjamurnya perusahaan-perusahaan swasta yang bisa sejajar bahkan bersaing dengan perusahaan-perusahaan di bawah badan usaha milik negara (BUMN).

Dengan semakin pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan, ini merupakan angin segar bagi pertumbuhan perekenomian ke arah yang lebih baik. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan impak bagi meningkatnya kondisi pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi, pada intinya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi tingkat regional (Rahmawati dkk, 2017).

Salah satu asas pembangunan perekonomian daerah adalah desentralisasi. Dengan diterapkannya otonomi daerah yang merupakan ide dari desentralisasi yang dilaksanakan pada per 1 januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjadikan pemerintah daerah berperan penting dalam menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan utama daerah. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan di daerah maka semakinbesar potensi penerimaan daerah tersebut. Dimana semakin banyak perusahaan-perusahaan di daerah maka semakin banyak pajak yang terhimpun sehingga meningkatkan PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerahyang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (djpk.kemenkeu.go.id,2020).

Tabel 1.1
Uraian Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD Propinsi Aceh
Tahun 2013-2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	PDRB (Rupiah)	PAD (Rupiah)
2013	12.684.806.015.000	111.755.826.600	1.325.000.000.000
2014	13.906.667.816.000	113.490.159.300	1.731.000.000.000
2015	14.152.818.718.000	112.665.532.200	1.986.000.000.000
2016	14.229.717.090.000	116.374.299.900	2.060.000.000.000
2017	15.487.974.087.000	121.240.978.700	2.227.000.000.000

*Sumber:*BPS Propinsi Aceh Tahun 2021

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh sepanjang 5 tahun terakhir berjumlah 12,6-14,7 trilyun rupiah. Peningkatan juga terjadi pada realisasi belanja pemerintah Provinsi Aceh. Sepanjang tahun 2013-2017 pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh mencapai 12,05 hingga 15,18 trilyun rupiah setiap tahunnya. Pendapatan keuangan Pemerintah Provinsi Aceh sebagian besar berasal dari Pos lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan kontribusi sebesar 53-69 persen pertahun. Pendapatan dari PAD sangat kecil jumlahnya.

Sedangkan belanja Pemerintah Provinsi Aceh dialokasikan terbanyak kepada belanja barang dan jasa dengan kontribusi sebesar 28-50 persen setiaptahunnya. Realisasi pendapatan seluruh kabupaten/kota di Aceh setiap tahunnya sangat besar dan terus meningkat, dari 16,7 trilyun rupiah pada tahun 2013 hingga mencapai 31,5 tirlyun rupiah pada tahun 2016 dan ditargetkan berjumlah 30,9 trilyun rupiah tahun 2017. Sumber pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan, terutama dari DAU dan DAK dengan kontribusi sebesar 58 hingga 80 persen per tahun. Dana PAD sendiri sangat minim jumlahnya.

Sedangkan belanja seluruh tingkat dua dalam Provinsi Aceh berjumlah 15,5 hingga 30,9 trilyun rupiah pada tahun 2013-2017. Sebagian besar belanja ini diperuntukkan untuk belanja pegawai, yaitu sejumlah 37-58 persen per tahun. Secara total, pendapatan daerah Aceh yang bersumber dari dana Provinsi Aceh dan seluruh dana Kabupaten/Kota terus meningkat setiap tahunnya, dari 35,95 trilyun rupiah pada tahun 2014 hingga mencapai angka 45,62 trilyun rupiah di tahun 2017. Demikian juga dengan belanja daerah Aceh, yang terus bertambah dari 32,49 trilyun rupiah pada tahun 2014 hingga sebesar 46,09 trilyun rupiah di

tahun 2017. Pendapatan daerah Aceh sebagian besar berasal dari dana perimbangan, sementara dana PAD sangat kecil kontribusinya. Untuk belanja daerah Aceh, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai (aceh.bps.go.id, 2020).

Tabel 1.2
Uraian Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	PDRB (Rupiah)	PAD (Rupiah)
2013	684.806.015	4.594.543.920.000	46.928.106.802
2014	906.667.816	4.773.693.840.000	112.034.104.121
2015	1.152.818.718	4.935.274.150.000	130.428.452.038
2016	1.029.717.090	5.151.377.694.000	140. 614.479.580
2017	1.487.974.087	5.315.219.500.000	161.743.458.643

*Sumber:*BPS Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh sepanjang 5 tahun terakhir berjumlah 46,112-130,161 jutaan rupiah. Peningkatan juga terjadi pada realisasi belanja pemerintah Provinsi Aceh. Sepanjang tahun 2013-2017 pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh mencapai 112,130 hingga 140,161 jutaan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan keuangan Pemerintah Provinsi Aceh sebagian besar berasal dari Pos lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan kontribusi sebesar 53-69 persen pertahun. Pendapatan dari PAD sangat kecil jumlahnya.

Teori menjelaskan bahwasanya perkembangan variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB dapat mempengaruhi PAD disuatu daerah. Disini dapat dilihat fenomena perkembangannya di salah satu daerah yaitu Kabupaten Aceh Barat. Selain berpedoman pada teori, juga penting untuk melihat data dan fakta di lapangan mengenai perkembangan ketiga variabel tersebut.

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh,

dengan luas wilayah 2.927,95 km². Kabupaten ini berdiri sejak tahun 1956 sampai dengan sekarang melalui dasar hukum UURI Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Setidaknya pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencapai angka Rp. 1.487.974.087. Sedangkan PDRB nya mencapai angka Rp. 5.315.219.500.000 (BPS, Aceh Barat 2017).

Sementara itu menurut (BPPKAD, Aceh Barat 2017) PAD Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 menyentuh angka Rp. 161.743.458.643. Menurut data sementara yang peneliti dapatkan mulai dari tahun 2013-2017, dalam lima tahun tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Berdasarkanuraian di atas dapat dilihat fenomena perkembangan variabel pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD di Kabupaten Aceh Barat secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten AcehBarat''***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

1.4 ManfaatPenelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisanskripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 ManfaatTeoritis

a. Penulis

Penelitian ini membantu penulis dalam menganalisa penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dan dapat memperoleh bukti secara empiris berdasarkan data dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, baik secara observasi maupun wawancara.

b. Lingkungan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah bahan referensi dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya dan Universitas Teuku Umar pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Pemangku Kebijakan

Bagi Pemangku Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami pendapatan asli daerah (PAD) dan

memotivasi pemerintah agar terus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

b. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi studi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bagian pertama pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian dan hipotesis penelitian.

Bagian ketiga metode penelitian yang berisikan tentang ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasional variabel.

Bagian keempat hasil penelitian dan pembahasan, diantaranya gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, hasil analisis data, uji regresi linear berganda, analisis korelasi dan koefisien determinasi, uji t, uji F, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas.

Bagian kelima kesimpulan dan saran, diantaranya kesimpulan dari hasil skripsi, dan saran unuk beberapa pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan potensi penerimaan yang dapat diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Secara umum dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Yani (2013, h. 51-52) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Rusyadi (2007) dalam Bella dkk (2013, h. 747-752) Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran

rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potens i-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung membiayai pembiayaan pemerintah dan membangun daerah.

Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya "kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah". Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak *(taxing power)* maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan wewenang dan hak untuk :

1. kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. Hak untuk mendapatkan dukungan keuangan dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Menurut Sudaryo dkk (2017, h. 105-106) dalam undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, PAD dibagi menjadi beberapa bagian yang dipaparkan sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaiaan atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budget tidak menonjol, dalam hal- hal tertentu retribusi darah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi

yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan menmperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain- lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain- lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dalam pelaksanaanya di daerah diatur lebih lanjutnya dengan menggunakan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan diluar yang sudah ditetapkan Samudra dkk (2015, h.54).

Menurut Rosidin (2015, h. 397) PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang sudah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

PAD setiap daerah tidak sama karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya. Walaupun daerah diberi otonomi seluas-luasnya, pada umumnya besaran PAD jauh lebih kecil daripada bantuan yang diberikan pusat. Hal ini merupakan konsekuensi pengaturan kekuatan keuangan di negara kesatuan. Dalam keadaan bagaimanapun, kekuatan keuangan pusat harus lebih besar daripada daerah untuk menjaga keutuhan negara.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi wilayah dalam wilayah sendiri yang dia tur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya di berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program strategis kenegaraan.

Menurut Wahyudi dkk (2014) dalam Hanafi dan Zulham (2019, h. 398)

menyebutkan pengeluaran pemerintah berbentuk belanja pemerintah merupakan pemikiran antara gabungan produk yang diproduksi untuk pemenuhan barang publik dengan pelayanan untuk masyarakat yang berisi jawaban atas putusan yang dibuat pemerintah. Guna memisahkan anggaran belanja terhadap capaian prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maka pembagian belanja daerah dibedakan ke dalam belanja langsung (belanja publik) dan belanja tidak langsung (belanja aparatur).

Sedangkan menurut Silalahi dkk (2013, h. 97-98) pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pembangunan,membayar gaji- gaji pegawai, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat dan membiayai segala jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat (AD) dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Adanya pengeluaran pemerintah (G) dalam perekonomian tiga sektor akan memperbesar pengeluaran *agregat* atau *aggregade demand* (AD). Sebelum ada G, maka AD = C + I, akan tetapi setelah adanya G maka nilai dari AD = C + I + G, pertambahan G dalam perekonomian dapat menaikan output atau produk nasional (Y). Kenaikan Y sebagai akibat dari kenaikan G.

Menurut Mangkoesoebroto (2014) perkembangan teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan menjadi :

a. Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap- tahap

pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembanga n ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar pula banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

b. Teori Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubugan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} <,< \frac{PP_kP}{PPK_n}$$

Keterangan:

PPKP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : jangka waktu (tahun)

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiaya pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan peneluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran untuk membiayai program- program yang di dalamnya pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Suparmoko (2003) dalam Anggara (2016, h. 215) pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran negara yang menyangkut macam dan sifat pengeluaran yang diperlukan dalam setiap bentuk penyediaan barang-barang publik, mengalokasikan barang produksi dan barang konsumsi, memperb aiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional, stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan rill yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Menurut Muliza dkk (2017, h. 56) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Dikutip dari Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (2014, h. 85) menyebutkan bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkanoleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, ata u

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Selanjutnya dalam Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (2014, h. 86) menyebutkan PDRB menurut lapangan usaha dikelompokan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standart Industrial Clasification of All Economic Activities (ISIC) sebagai berikut :

a. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan

   Terdiri dari subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

b. Sektor pertambangan dan penggalian

   Terdiri dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi, tambangan bukan migas dan penggalian.

c. Sektor industri pengelolaan

   Terdiri dari subsektor industri migas terdiri dari pengkilangan minyak bumi dan gas alam cair (LNG) dan industri bukan migas.

d. Sektor listrik, gas dan air bersih

   Terdiri dari subsektor listrik, gas dan air bersih.

e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

   Terdiri dari subsektor pedagang besar dan eceran, hotel dan restoran.

f. Sektor pengangkutan dan komunikasi

   Terdiri dari subsektor pengangkutan dan komunikasi.

g. Sektor konstruksi

h. Sektor Keuangan

i. Sektor jasa

Dari sektor-sektor diatas PDRB dapat dihitung dengan menggunakan metode perhitungan PDRB. Menurut Arsyad (2015, h. 31) Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan, yang dimana PDRB atas harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Metode perhitungan PDRB dibagi menjadi dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Metode Langsung

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung dapat dilakukan degan mempergunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya. Nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai

input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

Pendekatan pendapatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan- kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

Pendekatan pengeluaran pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto dimana nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor menjadi nilai ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing- masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB indonesia ke seluruh wilayah bagian indonesia menggunakan alokator tertentu. Alokator-alokator tersebut yang dapat digunakan

diantaranya, yaitu :

a. Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan,
b. Jumlah produksi fisik,
c. Tenaga kerja,
d. Penduduk

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing- masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Menurut Todaro (2016, h. 147) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB).

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari perkembangan pendapatan per kapita masyarakatnya. Untuk melihat pendapatan nasional kita dapat melihat dari PDB dan jumlah penduduk suatu negara tersebut. Apabila Produk Domestik Bruto (PDB) terus berkembang maka akan sejalan dengan perkembangan penerimaan pendapatan negara. Pendapatan perkapita menunjukan kemampuan masyarakat membayar pengeluaranya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Menurut Todaro pendapatan perkapita merupakan salah satu

ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akanproduk-produk pertanian.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Tujuan penelitian	Model Analisis	Hasil
1	Hakib, Arifin dan Rahman (2020)	Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASATA	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah maminasata periode 2014-2018 (studi kasus 4 kabupaten/kota: Makassar, Maros, Gowa dan Takalar)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perolehan danpengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian melalui perolehan data.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Wilayah MAMINASATA
2	Ritongga dan Wulantika (2020)	Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-)	Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda	Variabel PDRB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)

3	Hanafi dan Zulham (2019)	Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan indeks manusia di Kabupaten Aceh Selatan	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Selatan	Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Selatan.

4	Taufik, Wibisono dan Mulyani (2019)	Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD serta mengetahui pengaruh PBB terhadap PAD	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data Time Series	Tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan berada di angka 111,8 %.Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah berada dalam katergori cukup baik dengan kata lain bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan berada pada angka 35,43%.Hasil yang didapat sangat berpengaruh karena pendapatan dari PBB terhadap PAD melebihi dari target
5	Perwira, Ridwan dan Fattah (2019)	Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota DiSulawesi Tengah	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, pengeluaran pembangunan dan jumlah penduduk produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian secara simultan variabel- variabel tersebut mempengaruhi PAD dan secara parsial variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD

6	Sunandar (2017)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)	Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, Pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan investasi terhadap pendapatan asli daerah provinsi DI Yogyakarta	Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.
7	Muliza, Zulham dan Seftarita (2017)	Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Propinsi Aceh	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel variabel belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan serta Produk Domestik Regional Bruto Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh	Analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan *random effect model* (REM)	Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini terjadi karena pemerintah kabupaten/kota masih lebih dominan mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap IPM.

8	Zahari MS(2016)	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sarolangun	Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda	Hasil dari penelitiannya adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
9	Hastuti L.K., Kadarisman dan Rohman (2016)	*Effect Of Government Spending And PDRB On Pad West Java Province In 2005-2014*	*This study aims to determine government spending and the PDRB of the PAD of West Java province in 2005-2014*	*Analysis of the data in this study using multiple linear regression method. Test hypotheses using partial test (t test) and simultaneous (test F)*	*Results using partial test (t test) with a significance level of 5% was government spending has a negative and significant impact on the PAD West Java, while the PDRB has positive and significant for the province of West Java in 2005-2014, while the results of simultaneous regression (test f) that the independent variable and the PDRB is government spending together have a significant influence on the dependent variable PAD west Java province in 2005-2014*
10	Pratiwi (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan Inflasi terhadap PAD di Kabupaten Sragen tahun 1991-2013	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan *Partial Adjustment Model (PAM)*	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel PDRB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli Daerah

11	Jaya dan Widanta (2014)	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan terhadap PAD Kota Denpasar	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda	Hasil dari penelitiannya secara parsial adalah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar
12	Pratiwi (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan Inflasi terhadap PAD di Kabupaten Sragen tahun 1991-2013	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan *Partial Adjustment Model (PAM)*	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel PDRB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli Daerah

Sumber oleh peneliti 2021

2.5 Kerangka Pemikiran

Penulis ingin menjelaskan bahwa seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mempermudah penjelasan dari uraian diatas, maka penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

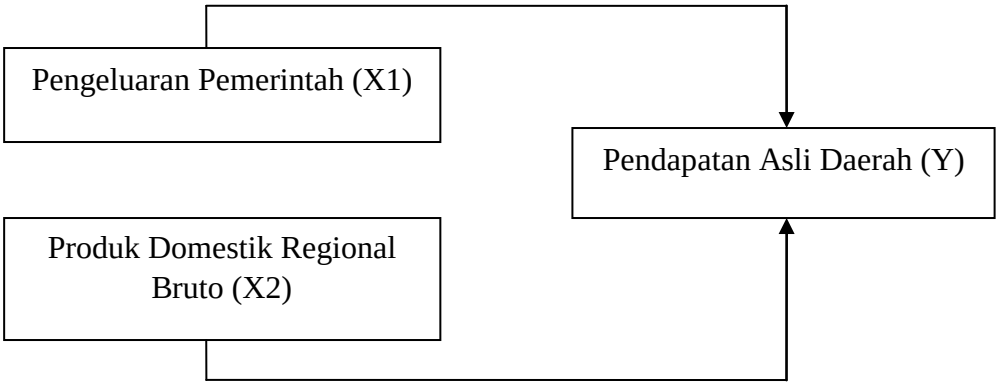

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran pengaruh pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah salah satu indikator untuk melihat besar kecilnya pendapatan daerah melalui hubungan dengan beberapa elemen yaitu pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto. Jumlah pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan beberapa studi empiris bahwa pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto dapat berpenguruh positif dan negatif terhadap pendapatan asli daerah, maka disusunlah perumusan

hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh positif pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat.
2. Diduga terdapat pengaruh positif produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat.
3. Diduga terdapat penagaruh positif pengeluaran pemerintah dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Bara.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh Barat dengan objek penelitian pengeluaran pemerintah, pendapatan domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2006-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2013 sampai dengan 2017, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, hasil- hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, fasilitas internet, dan bahan literatur lainnya untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunkan pada penelitian ini terdiri dari :

1. Penelitian lapangan *(field research)*

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk

memperoleh data sekunder secara langsung dari masing- masing instansi terkait.

2. Studi pustaka *(Library Research)*

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data guna keperluaan analisis dengan membaca buku-buku atau literatur lainya yang berkaitan dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda, analisis korelasi, analisis koefesien determinasi, uji t dan uji F. Hal ini untuk mencegah dan mengurangi kesalahan perhitungan manual, analisis data dilakukan dengan alat bantu Statistical Product and Service Solutions (SPSS).

3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan lanjutan dari regresi linier sederhana, ketika regresi linier sederhana hanya menyediakan satu variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y). Maka regresi linier berganda menyediakan lebih dari satu variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y) (kurniawan dan budi, 2016, h. 91).

Rumus persamaan regresi linier berganda :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = PAD

a = Konstanta *(intercept*)

β_1, β_2 = Koefisien Regresi *(slope)*

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = PDRB

e = *Error Term*

3.3.2 Analisis Koefesien Korelasi dan Determinasi

Analisis korelasi adalah suatu analisis untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu X variabel bebas dan Y variabel terikat (Hasan, 2013, h. 35).

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas akan diikuti oleh variabel terikat pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R^2) (Santosa dan Ashari,2012, h.125).

3.3.3 Uji t

Uji parameter individual (Uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (Syakhiruddin, 2010, h. 267).

3.3.4 Uji F

Uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefesien. Cara bekerjanya adalah dengan menentukan apakah kecocokan (*The Overall Fit*) dari sebuah persamaan regresi berkurang secara signifikan dengan membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap hipotesis nol (Sarwoko, 2011, h. 72).

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolinieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Berdasarkan pengertian uju normalitas tersebut maka uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel (*univariate*) tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasi (*multivariate*).

Tidak terpenuhinya normalitas pada umunya disebabkan karena distribusi data yang dianalisis tidak normal, karena terdapat nilai ekstrem pada data yang diambil. Nilai ekstrem ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel, bahkan dalam kesalahan melakukan input data atau memang karena karakteristik data tersebut sangat jauh dari rata-rata. Dengan kata lain data tersebut memang benar-benar berbeda disbanding yang lain. Untuk mendeteksi apakah nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka dapat digunakan metode analisis grafik dan metode statistic (Suliyanto, 2011, h. 75).

3.4.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tertinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011, h. 88).

3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada variabel- variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section.

Uji ini digunakan untuk melihat dimana korelasi antar variabel terikat. Jika maka secara logika persamaan regresinya diwakili oleh satu variabel saja. Pada pembahasan ini multikoliniearitas dinilai dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerancenya lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas.

Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan nilai *Predected Standardized* sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai residual *Studentized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas

pada model regresi yang dibentuk (Suliyanto, 2011, h. 112).

3.4.4 Uji Autokolerasi

Autokolerasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data time series) atau urutan tempat/ruang (cross section), atau korelasi yang timbul pada dirinya sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka uji asumsi tentang autokorelasi sangat penting untuk dilakukan tidak hanya pada data yang bersifat time series saja, akan tetapi semua data (variabel independen) yang diperoleh perlu diuji terlebih dahulu autokolerasinya apabila dianalisis dengan regresi linier berganda. Pengujian autokolerasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak (Asmara dan Mimit, 2018, h. 186).

Secara statistik pengujian hipotesis dapat diukur dari nilai koefisien korelasi (r) , nilai koefisien determinasi (R^2), uji statistik (F) dan uji parsial (t) perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila hasil uji nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variabel- variabel utama pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing- masing variabel sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, membayar gaji-gaji pegawai,

membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat dan membiayai segala jenis infrastruktur yang penting di Kabupaten Aceh Barat yang diukur dalam satuan rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Aceh Barat yang diukur dalam satuan rupiah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber potensi dana untuk membiayai pengeluaran rutin di Kabupaten Aceh Barat yang diukur dalam satuan rupiah.

3.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik yang digunakan pada penelitian untuk uji t adalah :

a. H_0; $\beta i = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independent (X_1, X_2,) terhadap variabel dependent (Y).
b. H_1; $\beta i \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independent (X_1, X_2,) terhadap variabel dependent (Y).

Kaidah pengambilan keputusan untuk uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai probabilitas sign > α (0,05), maka H_0 diterima, atau jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka signifikan.
b. Jika nilai probabilitas sign < α (0,05), maka H_0 ditolak, atau jika $t_{hitung} \leq$ dari t_{tabel}, maka tidak signifikan.

Hipotesis statistik yang digunakan pada penelitian untuk uji F adalah :

a. H_0; $\beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan (serentak) antara variabel independent (X_1 X_2) terhadap variabel dependent (Y).

b. H_1; $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh secara simultan (serentak) antara variabel independent (X_1 X_2) terhadap variabel dependent (Y).

Kaidah pengambilan keputusan untuk uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai probabilitas sign F < α (0,05), atau jika $F_{hitung} \geq F_{tabel,}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independent ($X_{1,}$ $X_{2,}$) terhadap variabel dependent (Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat dengan objek penelitian pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dimana Kabupaten Aceh Barat terletak anatara $04^0 06'$-$04^0 47'$ Lintang Utara dan $95^0 52'$-$96^0 30'$ Bujur Timur dengan luas mencapai 2.972,95 km^2. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 Kecamatan, 33 mukim dan 322 Desa. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Aceh Barat

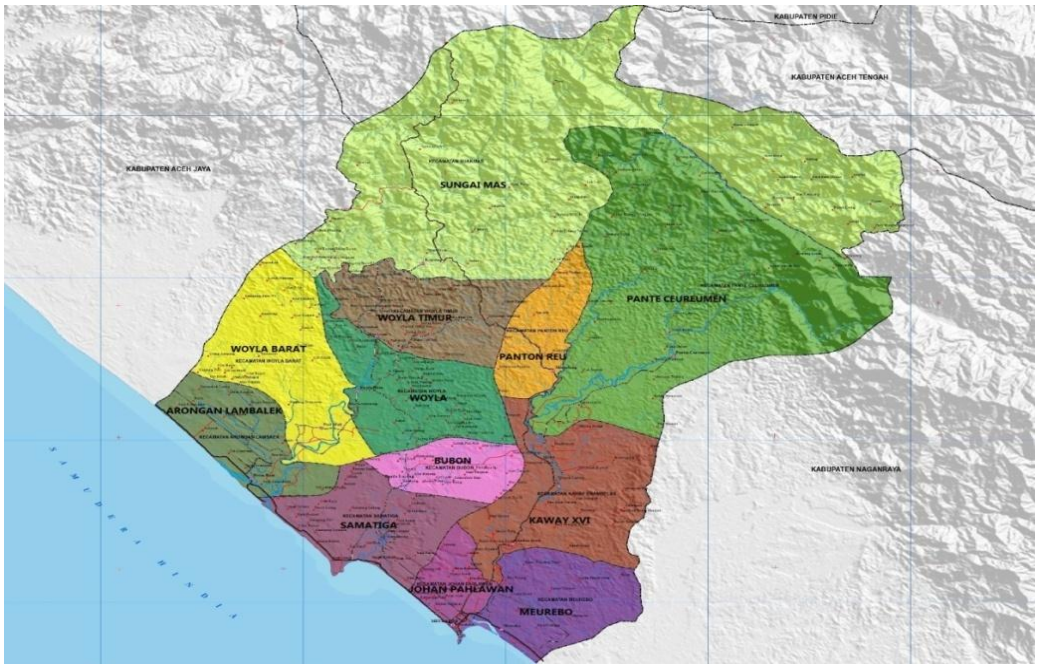

Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan jumlah pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD di Kabupaten Aceh Barat dalam belasan tahun terakhir. Selain itu setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara valid dari instansi-instansi terkait, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data yakni spss untuk dapat melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD dan PDRB terhadap PAD secara parsial dan juga untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap PAD secara simultan.

Dalam melihat data dan fakta yang didapatkan setelah melakukan penelitian, PAD Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan dengan tren yang positif yang dapat dilihat mayoritas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PAD Kabupaten Aceh Barat selalu meningkat setiap tahunnya dikarenakan ekonomi yang terus bertumbuh dengan baik. Pengeluaran pemerintah khususnya disektor pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang vital bagi masuknya investor yang semakin menghidupkan industri produksi maupun bidang jasa, sehingga berdampak kepada meningkatnya realisasi pajak dan retribusi daerah dan pada akhirnya PAD Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan.

Seiring meningkatnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan PAD di Kabupaten Aceh Barat, PDRB juga merupakan variabel yang erat kaitannya dengan kedua variabel diatas. PDRB merupakan representasi dari perekonomian suatu daerah yang merupakan akumulasi dari seluruh sektor ekonomi yang berjalan. Dari hasil penelitian di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Barat,

angka PDRB juga mengalami pertumbuhan yang positif seperti pengeluaran pemerintah maupun PAD.

4.2 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya terdapat 15 tahun data yang berhasil dikumpulkan dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan analisis data. Seluruh data variabel dalam penelitian ini berhasil didapatkan yaitu data pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD Kabupaten Aceh Barat. Berikut ini merupakan data penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian :

4.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Pengeluaran Pemerintah dalam satuan Rupiah di Kabupaten Aceh Barat

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	401.180.972.000	0
2007	508.398.905.000	21
2008	481.897.638.000	-5
2009	443.419.005.000	-9
2010	489.341.761.000	9
2011	520.526.507.000	6
2012	588.981.727.693	12
2013	720.457.769.654	18
2014	973.174.505.879	26
2015	1.123.320.640.321	13
2016	1.329.717.090.209	16
2017	1.353.258.094.692	2
2018	1.216.330.094.839	-11
2019	1.366.760.779.513	11
2020	1.399.118.001.000	2

Sumber : Data Primer, 2021 (Data Diolah)

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15 tahun data yang berhasil didapatkan yaitu data dari tahun 2006-2020. Perkembangan jumlah pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun mayoritas mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Namun terdapat fluktuasi karena adanya sedikit penurunan jumlah pengeluaran pemerintah yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 481.897.638.000 yang sebelumnya Rp. 508.398.905.000. Kemudian pada tahun 2009 sebesar Rp. 443.419.005.000 yang sebelumnya Rp. 481.897.638.000. Selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.216.330.094.839 yang sebelumnya Rp. 1.353.258.094.692. kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.399.118.001.000 yang sebelumnya Rp. 1.366.760.779.513. Penurunan terjadi karena beberapa sebab diantaranya adanya dana silpa pada tahun anggaran sebelumnya dan adanya belanja pada beberapa unit pemerintahan yang menerapkan penghematan anggaran.

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah PDRB dalam satuan Rupiah di Kabupaten Aceh Barat

Tahun	PDRB (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	954.906.270	0
2007	1.054.422.650	9
2008	1.117.416.360	6
2009	1.197.904.530	7
2010	1.258.936.750	5
2011	1.324.894.540	5
2012	4.594.543.920	71
2013	4.773.693.840	4
2014	4.933.842.700	3
2015	5.143.077.600	4
2016	5.315.210.500	3
2017	6.013.220.000	12
2018	6.623.950.000	9
2019	6.945.830.000	5
2020	7.014.030.000	1

Sumber : Data Primer, 2020 (Data Diolah)

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15 tahun data yang berhasil didapatkan yaitu data dari tahun 2006-2020. Perkembangan jumlah

PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.594.543.920, tahun 2013 Rp. 4.773.693.840, pada tahun 2014 Rp. 4.933.842.700, pada tahun 2015 Rp. 5.143.077.600, pada tahun 2016 Rp. 5.315.210.500, pada tahun 2017 Rp. 6.013.220.000, pada tahun 2018 Rp. 6.623.950.000, pada tahun Rp. 6.945.830.000, dan pada tahun Rp. 7.014.030.000. Hal ini menunjukan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Barat terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang semakin baik.

4.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah PAD dalam satuan Rupiah di Kabupaten Aceh Barat

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	17.141.428.849	0
2007	21.710.256.581	21
2008	40.423.494.271	46
2009	27.874.493.673	-45
2010	24.272.574.383	-15
2011	21.042.866.954	-15
2012	24.727.256.869	15
2013	46.928.106.802	47
2014	112.034.104.121	58
2015	130.428.452.038	14
2016	140.614.479.580	7
2017	161.743.458.643	13
2018	125.451.883.804	-29
2019	153.799.291.478	18
2020	160.963.461.693	4

Sumber : Data Primer, 2020 (Data Diolah)

Data pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15 tahun data yang berhasil didapatkan yaitu data dari tahun 2006-2020. Perkembangan jumlah PAD dari tahun ke tahun mayoritas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun terdapat fluktuasi karena adanya penurunan jumlah PAD dalam 3 tahun berturut-turut pada tahun 2009 sebesar Rp.27.874.493.673, tahun 2010

Rp.24.272.574.383 dan pada tahun 2011 Rp. 21.042.866.954, yang sebelumnya pada tahun 2008 dapat menyentuh angka Rp.40.423.494.271. Kemudian adanya kenaikan jumlah PAD dalam 4 tahun berturut-turut pada tahun 2014 sebesar Rp.112.034.104.121, tahun 2015 Rp.130.428.452.038, tahun 2016 Rp.140.614.479.580, tahun 2017 Rp. 161.743.458.643, kemudian terjadi penurunan jumlah PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 125.451.883.804, dan terjadi peningkatan jumlah PAD dalam 2 tahun berturut-turut pada 2019 sebasar Rp.153.799.291.478, dan pada tahun 2020 sebasar Rp. 160.963.461.693. Turunnya angka realisasi PAD dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu dan juga kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pemilik usaha faktor produksi maupun jasa untuk melakukan kewajibannya membayar pajak ataupun retribusi.

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai dengan perundang-undangan. Naik turunnya PAD tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain dari pada serapan pajak dan retribusi, pemerintah juga harus dapat mengembangkan unit-unit produksi milik daerah sehingga PAD dapat semakin meningkat. Selain itu pemerintah daerah juga harus pandai mencari investor yang mau berinvestasi di daerah sehingga sumber keuangan daerah memiliki banyak alternatif dari segi sumber dan kuantitas pendapatannya.

4.3 Hasil Analisis Data

Dari proses analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F, yang akan diolah dengan menggunakan program komputer (SPSS) dan menghasilkan hasil analisis dengan penjelasan sebagai berikut :

4.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-513.601	690.068		-7.441	0.000
PP	0.173	0.017	1.149	10.027	0.000
PDRB	-4.391	2.836	-0.177	-1.548	0.148

Sumber : Hasil Regres, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 terkait dengan uji regresi linear berganda di atas, maka persamaan regresi tersebut dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = -513.601 + 0.173\ X_1 + -4.391\ X_2 + e$$

Persamaan regresi di atas mempunyai arti sebagai berikut :

a. Konstanta

(a) = -513.601 artinya apabila variabel independen sama dengan nol atau dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB adalah konstan dan tidak berubah.

b. Koefisien Regresi (Pengeluaran Pemerintah)

c. Pada variabel (Pengeluaran Pemerintah) = 0.173 memiliki arti bahwa jika variabel (Pengeluaran Pemerintah) meningkat sebesar 1 Rupiah, maka variabel PAD Kabupaten Aceh Barat akan naik sebesar 0.173.

d. Koefisien Regresi (PDRB)

Pada variabel (PDRB) = -4.391 memiliki arti bahwa jika variabel (PDRB) meningkat sebesar 1 Rupiah, maka variabel PAD Kabupaten Aceh Barat akan turun sebesar -4.391.

4.3.2 Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi

Tabel 4.5 Analisis Korelasi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.988[a]	0.976	0.972	0.014

Sumber : Hasil Regres, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas diketahui besarnya nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0.988 artinya terdapat pengaruh yang sangat kuat antara pengaruh faktor input variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap variabel PAD Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0.976 atau 97,6 % variabel PAD dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB, sedangkan sebesar 0,14 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti seperti kebijakan-kebijakan pemerintah tentang keuangan atau anggaran publik.

4.3.3 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui atau menyelidiki lebih lanjut, apakah ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara

parsial dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan menggunakan taraf signifikan 0,05 = 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 15-2-1 = 12.

Hasilnya dimana untuk variabel pengeluaran pemerintah dengan membandingkan antara t_{hitung} (10.027) > t_{tabel} (1,782) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD.

Sedangkan untuk variabel PDRB dengan membandingkan antara t_{hitung} (-1.548) > t_{tabel} (2.015) dan nilai signifikansi sebesar 0.148 $\leq$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel PAD.

4.3.4 Uji F

Tabel 4.6 Uji F
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	491.000	2	245.000	0.693	0.000[a]
	Residual	121.000	12	101.000		
	Total	503.000	14			

Sumber : Hasil Regres, 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas Uji F dilakukan untuk mengetahui atau menyelidiki lebih lanjut, apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan. Uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}, dimana nilai F_{hitung} yang dihasilkan dari tabel anova sebesar 0.693 dengan signifikasi sebesar 0.000. Dengan membandingkan antara F_{hitung} (0.693) > dari

F_{tabel} (3.89) dan nilai signifikasi sebesar 0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (pengeluaran pemerintah) dan (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (PAD).

4.4 Uji Asumsi Klasik

Pada prakteknya, beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk mengestimasi suatu model dengan sejumlah data. Masalah tersebut dalam buku ekonometrika termasuk dalam pengujian asumsi klasik yaitu ada tidaknya masalah *normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas* dan *autokerelasi*. Terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut di atas akan menyebabkan uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dengan grafik normal *P-Plot* akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 4.1
Grafik Normal P-Plot

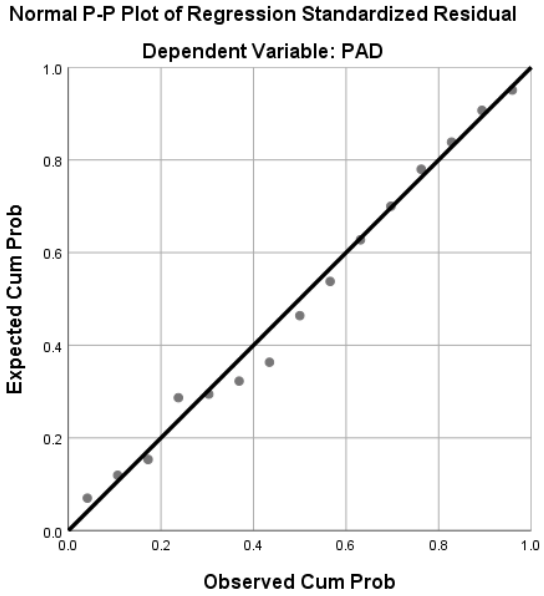

Berdasarkan Grafik 4.1 normal p-plot terlihat bahwa pola distribusi normal, karena menunjukan data yang mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk menganalisis PAD berdasarkan variabel bebasnya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Berdasarkan aturan *Varisnce Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0.100 dan nilai VIF < 10.00

Tabel 4.7
Uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PP	.153	6.528
PDRB	.153	6.528

Berdasarkan Tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB nilai VIF nya < 10 dan nilai toleransinya > 0.100 sehingga model regresi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pola tertentu. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Grafik 4.2
Uji heteroskedastisitas

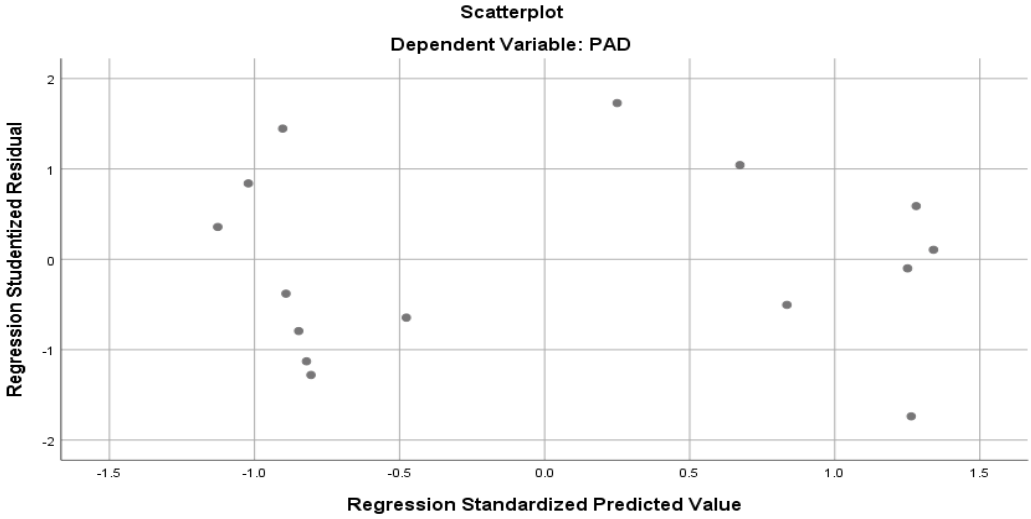

Berdasarkan Grafik 4.2 terlihat pola titik-titik membentuk suatu pola yang tidak jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian model regresi layak dipakai untuk memprediksi bagaimana pengaruh variabel dependen berdasarkan variabel independenya.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokolerasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Tidak terjadi gejala autokorelasi apabila nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan 4-du. Dari hasil uji autokorelasi didapatkan nilai du sebesar 1.539 < Durbin Watson 2.199 < 4-du 2.461. Dari angka yang tertera di atas dapat disimpukan bahwasanya tidak terjadi gejala autokorelasi dan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel X_1 (pengeluaran pemerintah) t_{hitung} (10.027) > t_{tabel} (1,782) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Untuk variabel X_2 (PDRB) antara t_{hitung} (-1.548) > t_{tabel} (2.015) dan nilai signifikansi sebesar 0.148 $\leq$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD.
2. Besarnya nilai korelasi (R) 0.988 dan nilai koefisien determinasi (R^2) 0.976 artinya tingkat pengaruh menyentuh angka 97,6 % yaitu masuk kedalam klasifikasi sangat kuat. Sehingga variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh sangat kuat terhadap PAD.
3. Nilai F_{hitung} yang dihasilkan dari tabel anova sebesar 0.693 dengan signifikasi sebesar 0.000. Dengan membandingkan antara F_{hitung} (0.693) > dari F_{tabel} (3.89) dan nilai signifikasi sebesar 0.000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (pengeluaran pemerintah) dan (PDRB) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (PAD).

5.2 Saran

Adapun yang bisa peneliti sarankan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk dapat menggunakan anggaran dan belanja daerah dengan efektif dan efisien sesuai asas peraturan perundang-undangan, sehingga pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi nyata khususnya bagi masyarakat serta perekonomian yang dapat bertumbuh semakin baik pada umumnya. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan PDRB kabupaten Aceh Barat yang semakin meningkat.
2. Bagi masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya untuk memiliki kewajiban membayar pajak dan retribusi, sehingga realisasi PAD kabupaten Aceh Barat dapat terus meningkat demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan berkeadilan.

Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel yang lebih banyak lagi dan menggunakan metode analisis data lainnya dalam kajian yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD. Hal ini agar penelitiannya semakin inovatif dan dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad. 2014. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Ambadar, Jackie. 2010. *Membentuk Karakter Pengusaha*. Bandung. Kaifa.

Andi Hakib dkk, *Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASATA*, Center of Economic Student Journal, Vol. 3 No. 3 (2020) Hal. 290-300.

Arbi. 2010. *Indikator-Indikator Mikro Ekonomi*. Jakarta: LPFE-UI.

Ariputra, IGNB. I Ketut Sudiana. *2019. Effect of Capital, Manpower and Raw Materials on Production and Income of Ukir Kayu Crafts Industry*. ISSN: 2395-7492. Vol: 6. No: 5. 261-266. *International Research Jurnal of Management, IT & Social Sciences.*

Arsyad, Lincolin, "*Ekonomi Pembangunan Edisi 5",* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015).

Arum Akuarista dan Gregorius N. Masdjojo, *Kajian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Periode 2008-2012*, Prosiding Papers Unisbank, ISBN: 978-979-3649-81-8, hal. 1-9.

Asmara, Lina. Mimit Primyastanto. 2018. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*. Malang: UB Press.

Astuty, try. 2015. *Ekonomi*. Jakarta: Vicosta Publishing.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat.2018. Aceh Barat Dalam Angka.

Cantika Bella, Iman Hanafi, dan Abdul Wachi. 2013. *Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Perdagangan Pasar Minggu Kota Malang.* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Universitas Brawijaya, Malang.

Dwi Hastuti L.K, dkk, *Effect Of Government Spending And PDRB On Pa d West Java Province In 2005-2014*, Jurnal llmu Ekonomi Vol 6, no 2, Juli - Desember 2016, hal. 1241-1254.

Fachrizal, Riza. 2016. Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Industri Kerajinan Kulit di Kabupaten Merauke. Vol: 9. No:2. 66-74. *Agrikan UMMU-Ternate*.

Fattah Mochammad, Pudji Purwanti. 2017. *Manajemen Industri Perikanan*.

Malang, Penerbit UB Press.

Gde Bhaskara Perwira Jaya dan A.A Bagus Putu Widanta, *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 3, No. 5, Mei 2014, ISSN: 2303-0178, hal. 201-208.

Gufron Reynaldin Sunandar, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2017, hal. 1-20.

Hadi Mahmudi, dkk, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Serta Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Ekonombis Universitas Mataram, Volume 3, No.1 Maret 2017, ISSN : 1412-7601, hal. 1-14.

Hanafi dan T. Zulham, *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan indeks manusia di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), ISSN.2549-8363, Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Vol.4 No.4 November 2019: 395-403.

Hasan, Iqbal. 2013. *Pokok-Pokok Materi Statistic 2 (Statistik Inferensif)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Iin Eko Pratiwi, Analisis *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal. 1-13.

Istiqomah, luthvia et.all. 2018. Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Nilai Produksi Industri Pisang Salai di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. ISSN:2303-1220. Vol: 7. No: 1. 43-54. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*.

Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kurniawan, Robert. Budi Yuniarto. 2016. *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya Dengan R*. Jakarta. KENCANA.

M. Zahari MS, *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*, Jurnal Eksis, Vol. 7, No. 2, November 2016, hal. 133-148.

Mangkoesoebroto, Guritno. 2014. *Ekonomi Publik,* Edisi Ketiga, BPFE. Yogyakarta.

Mankiw, N. Gregory. 2011. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.

Marito Ritongga dan Tri Wulantika, *Pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018),* Jurnal Diversita, ISSN 2461, Juni 2020 hal. 95-102.

Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,* (Jakarta : Erlangga, 2006).

Muh Ikram Idrus dan Irma, *Pengharuh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar,* Jurnal Ekonomi Balance, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 13 No 1 Tahun 2017, hal. 1-15.

Muliza dkk, *Analisis Penhgaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh,* Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 ISSN. 2502-6976 hal. 51-59.

Ningsih, NMC, I Gusti Bayu Indrajaya. 2015. Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. ISSN: 2301-8968. Vol: 8. No: 1. 83-91. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.*

Nugroho, Satya. Muchamad Joko Budianto. 2014. Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Teknologi Terhadap Hasil Produksi Susu Kabupaten Boyolali. ISSN: 1979-715X. Vol: 7. No: 2. 100-202. *Jurnal of Economics and Policy*.

Okta Rabiana Risma dkk, *Pengaruh suku bunga, produk domestik bruto dan nilai tukar rupiah terhadap eksport di Indonesia,* Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 4 Nomor 2, September 2018, ISSN. 2502-6976 hal. 300-317.

Ryan Perwira, dkk., *Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*, E-Jurnal Katalogis, Vol. 6, No. 2, Februari 2018, ISSN 2302-2019, hal.1-15.

Samudra, Azhari, Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak Retribusi Daerah.* Rajawali Pers. Jakarta.

Sudaryo, Yoyo, dkk. 2017. *Keuangan-Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. ANDI. Yogyakarta.

Taufik Wibisono dan Yani Sri Mulyani, *Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya,* Jurnal Ecodomica,Vol. 3 No. 2 September 2019 hal. 113-140.

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia.* Rajawali Pers. Jakarta.

LAMPIRAN 3 DATA INPUT

PENGELUARAN PEMERINTAH	PDRB	PAD
401180972000	954906270	17141428849
508398905000	1054422650	21710256581
481897638000	1117416360	40423494271
443419005000	1197904530	27874493673
489341761000	1258936750	24272574383
520526507000	1324894540	21042866954
588981727693	4594543920	24727256869
720457769654	4773693840	46928106802
973174505879	4933842700	112034104121
1123320640321	5143077600	130428452038
1329717090209	5315210500	140614479580
1353258094692	6013220000	161743458643
1216330094839	6623950000	125451883804
1366760779513	6945830000	153799291478
1399118001000	7014030000	160963461693

LAMPIRAN 4 DATA OUTPUT

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 5427 days.

```
REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).
```

Regression

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	80610373982.60	59969993592.730	15
PP	861058899453.33	397912859978.098	15
PDRB	3884391977.33	2422221522.130	15

Correlations

		PAD	PP	PDRB
Pearson Correlation	PAD	1.000	.985	.880
	PP	.985	1.000	.920
	PDRB	.880	.920	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.000	.000
	PP	.000	.	.000
	PDRB	.000	.000	.
N	PAD	15	15	15
	PP	15	15	15
	PDRB	15	15	15

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB, PP[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988[a]	.976	.972	10061230221.014	2.199

a. Predictors: (Constant), PDRB, PP

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49134861598445785000000.000	2	24567430799222892000000.000	242.693	.000[b]
	Residual	1214740242723006600000.000	12	101228353560250550000.000		
	Total	5034960184116879000000.000	14			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PDRB, PP

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-51392171135.601	6906471392.068		-7.441	.000		
	PP	.173	.017	1.149	10.027	.000	.153	6.528
	PDRB	-4.391	2.836	-.177	-1.548	.148	.153	6.528

a. Dependent Variable: PAD

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	13863787520.00	160012140544.00	80610373982.60	59242155356.786
Std. Predicted Value	-1.127	1.340	.000	1.000
Standard Error of Predicted Value	2958245376.000	7091239936.000	4396601996.767	990433668.042
Adjusted Predicted Value	13182929920.00	161205125120.00	81331303091.78	59271228541.885
Residual	-14843172864.000	16623434752.000	.000	9314889167.054
Std. Residual	-1.475	1.652	.000	.926
Stud. Residual	-1.738	1.729	-.031	1.026
Deleted Residual	-20590649344.000	18196529152.000	-720929109.180	11521631787.754
Stud. Deleted Residual	-1.923	1.910	-.028	1.080
Mahal. Distance	.277	6.021	1.867	1.385
Cook's Distance	.001	.390	.082	.103
Centered Leverage Value	.020	.430	.133	.099

a. Dependent Variable: PAD

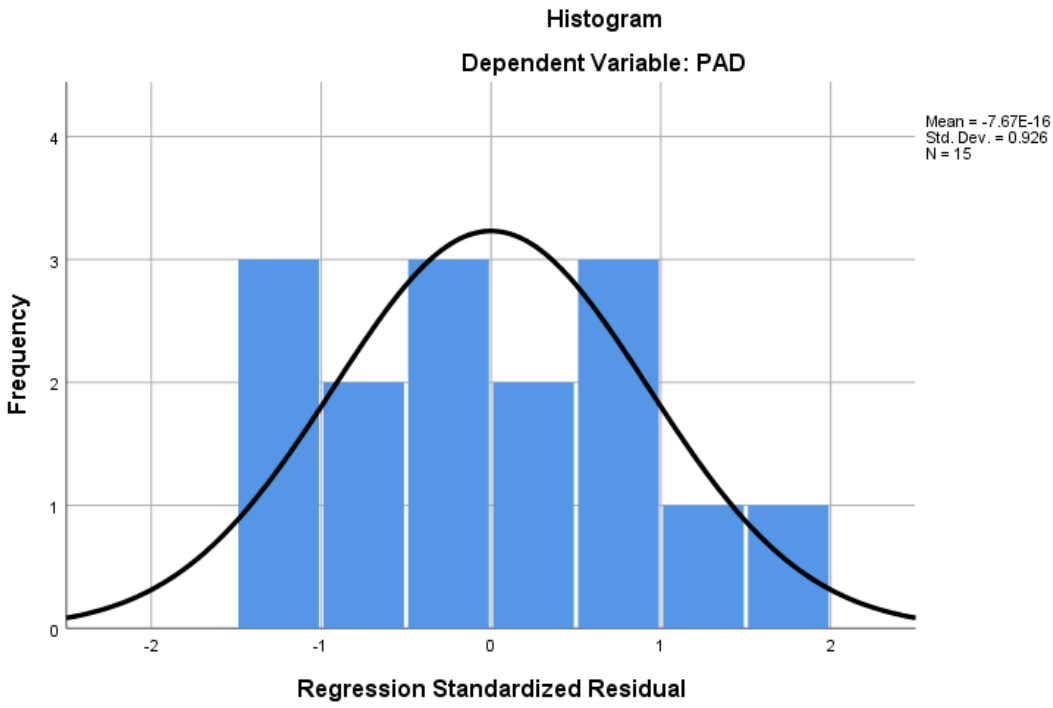
Histogram
Dependent Variable: PAD
Mean = -7.67E-16
Std. Dev. = 0.926
N = 15
Frequency
0
1
2
3
4
-2
-1
0
1
2
Regression Standardized Residual

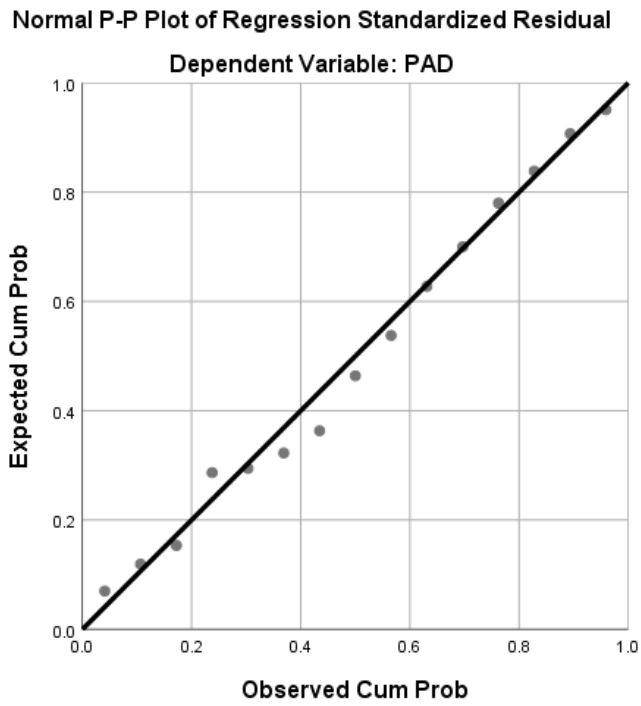
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PAD
Expected Cum Prob
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob

gukgkig

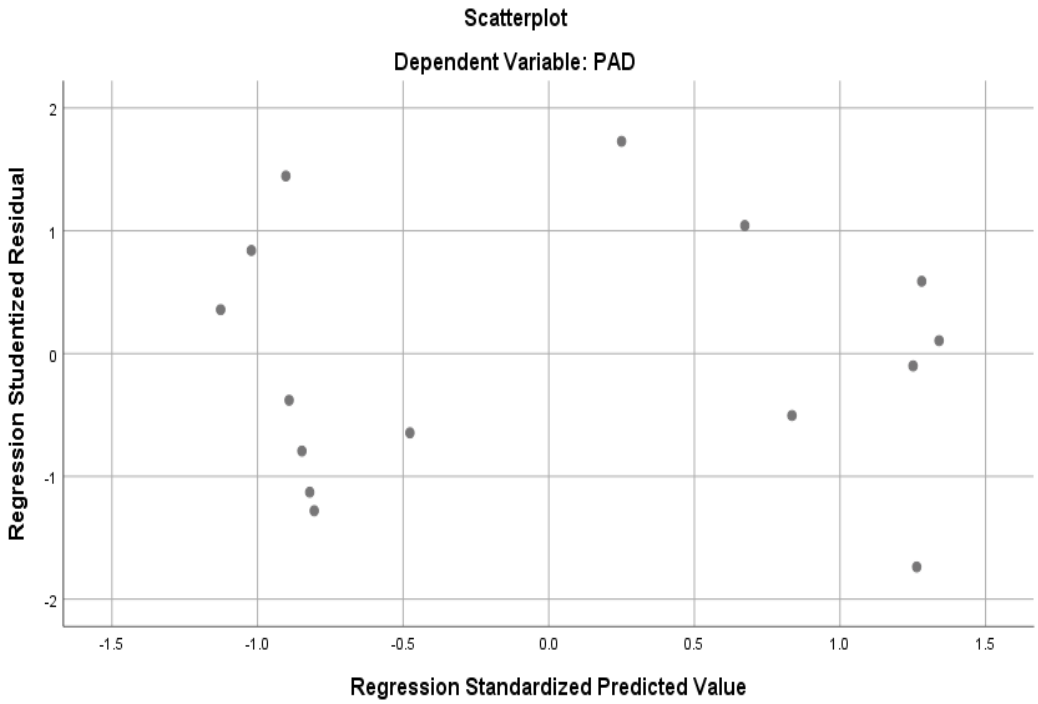
Scatterplot
Dependent Variable: PAD
Regression Studentized Residual
Regression Standardized Predicted Value
2
1
0
-1
-2
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5